

MAKALAH

INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah Lembaga Internasional



Disusun oleh:

Mulyani Putri

NIM : 1193030071

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
SEMESTER VI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

2021

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Abstrak | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 6 |
| A. Latar Belakang | 6 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Masalah..... | 7 |
| BAB II PEMBAHASAN..... | 9 |
| A. Perjanjian Bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (JEPA).. | 9 |
| B. Peran Penting Hubungan Diplomasi Ekonomi | 13 |
| BAB III PENUTUP | 14 |
| KESIMPULAN..... | 14 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 15 |

INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

Mulyani Putri

Hukum Tata Negara VI B

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yanip879@gmail.com

Abstrak

Dalam tulisan ini membahas pertanyaan tentang kekuatan mengikat Negara-negara dalam perjanjian internasional. Paling Kompleks hubungan antara subyek hukum internasional menjadikan kebiasaan internasional tidak dapat lagi digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul. Di Dalam hubungan internasional modern, keberadaan perjanjian internasional merupakan Wajib. Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah peran negara dalam perjanjian hukum internasional dan bagaimana negara terikat oleh perjanjian internasional. Masalah ini dikaji dengan pendekatan hukum berdasarkan teori hukum, asas hukum, sumber hukum internasional dan perjanjian internasional. Peran negara dalam perjanjian internasional akan mempengaruhi Tindakan negara yang berpartisipasi dalam perjanjian internasional.

Komitmen negara dalam perjanjian internasional disebabkan oleh tindakan Negara dan isi perjanjian internasional. Suatu negara dapat dihubungkan sehubungan dengan isi perjanjian internasional jika standar yang ditetapkan di dalamnya adalah bagian dari jus kogen. Pada tulisan ini membahas mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang merupakan kerjasama hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang harus mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui berbagai program yang telah dilakukan. Pembahasan ekonomi menjadi permasalahan situasi yang kompleks terkait dominasi kekuasaan dan dominasi ekonomi.¹ Dalam penelitian kebijakan luar negeri, setiap negara memiliki dicapai dalam berbagai proyek kerjasama

¹ Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Beragama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme Terkooptasi. *Jurnal Budaya dan Nilai dalam Pendidikan*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.46303/jcve.2021.2>

bilateral. Indonesia Ada banyak kepentingan nasional dalam kerjasama ekonomi bilateral ini. Dan selain itu Banyak faktor yang mendorong Indonesia menempuh jalur diplomasi ekonomi melalui perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dengan Jepang. Tujuan penelitian ini untuk melihat kepentingan nasional Indonesia dalam kerjasama IJEPA dan bagaimana Indonesia berupaya untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Pelajaran ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan deskripsi analitis. Pencari menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri dengan konsep kepentingan yang berbeda kerjasama nasional dalam kerjasama bilateral di bidang ekonomi

Keyword : *Hubungan Internasional, Perjanjian Bilateral, IJEPA*

Abstract

This paper discusses the question of the binding power of States in international treaties. The most complex relationship between the subjects of international law makes international customs can no longer be used to solve various problems that arise. In modern international relations, the existence of international treaties is mandatory. The problem discussed in this article is the role of states in international legal treaties and how states are bound by international treaties. This problem is studied with a legal approach based on legal theory, legal principles, sources of international law and international agreements. The role of states in international treaties will affect the actions of countries participating in international treaties.

State commitments in international agreements are caused by the actions of the State and the contents of international agreements. A country can be linked with respect to the contents of an international treaty if the standards set out in it are part of the jus cogen. This paper discusses the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), which is a bilateral economic relationship between Indonesia and Japan that must support the economic growth of the two countries through various programs that have been carried out. In foreign policy research, each country has achieved various bilateral cooperation projects. Indonesia There are many national interests in this bilateral economic cooperation. And besides that, there are many factors that encourage Indonesia to take the path of economic diplomacy through bilateral economic cooperation agreements with Japan. The purpose of this research is to see Indonesia's national interest in IJEPA cooperation and how Indonesia seeks to realize these interests. This lesson uses a qualitative case study

method with an analytical description. The seeker uses a foreign policy approach with the concept of different interests, national cooperation in bilateral cooperation in the economic field

Keyword : *International Relations, Bilateral Agreement, IJEPA*

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Defenisi hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Hubungan bilateral sering digunakan sebagai istilah dalam hubungan yang hanya melibatkan dua negara, terutama hubungan politik, ekonomi, dan budaya kedua negara. Menurut Peter Toma dan Robert Gorman, jika suatu negara memutuskan untuk bekerja sama dengan negara lain, hal ini disebabkan oleh motivasi tertentu, antara lain:

- 1) Motif konsolidasi kepentingan nasional, dimana kerjasama dianggap oleh suatu negara sebagai alat untuk memperkuat kepentingan nasionalnya.
- 2) Untuk menjaga perdamaian, kerjasama harus memberikan cara untuk menghindari konflik dan mencegah perang antara negara-negara yang bertikai.
- 3) Dorongan untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana diperlukan kerjasama untuk dapat memajukan tingkat kemakmuran ekonomi yang diinginkan oleh masing-masing negara.
- 4) Motivasi menghadapi eksternalitas, kerjasama dikatakan mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti penipisan sumber daya alam dan terorisme (Toma et al. Gorman 1991: 385-386).

Dalam tulisan ini membahas mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang yang merupakan salah satunya negara maju di Asia, sangat diperhitungkan untuk ditetapkan kerjasama dan hubungan baik dalam domain apa pun. Ini mendorong Indonesia ke Jepang untuk membangun mitra penting dalam usaha untuk memuaskan kepentingan kebangsaan Indonesia. Rekomendasikan untuk pelaksanaan kerja sama ekonomi bilateral pertama Pemerintah Indonesia harus Jepang, kerjasama disingkat IJEPA (Indonesia-Jepang Perjanjian Kemitraan Ekonomi) yang disepakati pada tanggal 20/08/2007. Persetujuan telah dicapai perjanjian kerjasama ekonomi antara dua negara dalam perdagangan barang dan jasa, investasi, hak milik kekayaan intelektual, serta energi dan sumber daya kekuatan mineral. Jepang juga tujuan ekspor kedua Sektor non migas Indonesia setelah China.

Hubungan ekonomi antara dua negara dianggap saling melengkapi satu sama lain. Misalnya, Jepang mengekspor ke Indonesia sebagai produk mobil jadi, sedangkan Indonesia mengekspor bahan mentah seperti bijih besi ke Jepang untuk diproses lebih lanjut. IJEPA memberikan keleluasaan kepada kedua negara untuk bekerja sama membangun perekonomian kedua negara dan mengurangi hambatan dengan adanya hak-hak khusus dalam perjanjian yang dapat memfasilitasi perjanjian perdagangan berbagai kegiatan ekonomi. Perjanjian Kerjasama Ekonomi IJEPA baru saja dimulai. Percepatan melaksanakan perjanjian ini. Sebuah komite bersama juga dibentuk untuk terdiri dari pejabat pemerintah masing-masing dari mereka akan bertanggung jawab ikuti ujian dan lakukan memantau pelaksanaan dan kegiatan kerjasama. Berdasarkan deskripsi latar belakang pertanyaan yang diajukan, penulis Merumuskan pernyataan masalah ditemui dalam penelitian ini, khususnya “Apa” hanya untuk kepentingan nasional Indonesia dalam menjalin kerjasama bilateral dengan Jepang melalui Indonesia-Jepang Perjanjian Kemitraan Ekonomi.

Penulis menjelaskannya untuk optimalkan kerjasama ini beberapa hal penting, termasuk memperkuat sistem pendukung IJEPA, meningkatkan tata kelola di peraturan tentang asal barang, meningkatkan tercapai dalam bidang produk pertanian dan pangan, tingkatkan penyesuaian untuk itu WTO plus, serta perlunya partisipasi dari dukungan negara-negara Asia lainnya Ekspansi FTA di Asia. Kasus ini untuk meningkatkan kepatuhan Jepang dan Indonesia di Implementasi IJEPA sesuai dengan standar yang ditentukan dari WTO. Dengan ketaatan yang besar dilaksanakan, hal ini akan mengakibatkan dampak positif pada perdagangan hubungan bilateral internal antar negara Perdagangan dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perjanjian Bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) ?
2. Bagaimana Peran Penting Hubungan Diplomasi Ekonomi ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perjanjian Bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Penting Hubungan Diplomasi Ekonomi

BAB II PEMBAHASAN

A. Perjanjian Bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), merupakan perjanjian bilateral di bidang ekonomi Indonesia-Jepang, yang bertujuan untuk meningkatkan impor, ekspor dan investasi di kedua negara. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan manfaat yang adil dan seimbang bagi kedua negara melalui kerjasama dalam liberalisasi pasar, fasilitasi dan peningkatan kapasitas yang diidentifikasi sebagai bidang prioritas. Tujuan pelaksanaan IJEPA adalah untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Menurut Badan Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri, tujuan kerja sama IJEPA adalah untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Ini termasuk kerjasama dalam pengembangan kapasitas, liberalisasi, dan peningkatan perdagangan dan investasi, untuk meningkatkan arus barang, investasi dan jasa, tenaga kerja dan perdagangan lintas batas. Karena kondisi ekonomi kedua negara saling melengkapi melalui perjanjian perdagangan bebas bilateral, kedua belah pihak sepakat bahwa kerangka tujuan kerja sama ini pertama-tama untuk meliberalisasi pertukaran barang dan jasa antara kedua negara. Dan kedua, memperkuat dengan memperkuat kegiatan proteksionis dan investasi kedua negara. Ketiga, menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual.

Keempat, tingkatkan transparansi dan ciptakan pemerintahan yang saling menguntungkan. Kelima, promosikan dengan memperkuat kegiatan dan kerja sama anti persaingan. Keenam, memperdalam kerangka kerja sama dan ketujuh, menetapkan prosedur yang efektif untuk melaksanakan kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan. Kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasari kerjasama ini. Kepentingan nasional Indonesia dalam kerjasama IJEPA adalah bahwa Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama Indonesia. Oleh karena itu, ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan hubungan kerja sama ekonomi ini.

Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jepang memegang pangsa pasar terbesar untuk produk Indonesia, menyumbang 20% dari total ekspor Indonesia, sedangkan Jepang adalah sumber impor terbesar kedua dari Indonesia, dengan 13%. Kerjasama IJEPA diharapkan dapat meningkatkan volume impor dan ekspor antara Indonesia dan Jepang. Indonesia memiliki kemampuan untuk mengirim pekerja semi

terampil ke Jepang. Hingga saat ini, Jepang masih merekrut tenaga kerja Indonesia di bidang farmasi, keperawatan, otomotif dan tenaga kerja. Dengan penurunan tarif pajak impor, Indonesia memiliki peluang yang sama untuk bersaing dengan negara-negara yang juga telah menjalin hubungan kerjasama ekonomi dengan Jepang, baik secara bilateral maupun multilateral. Dengan penurunan tarif, jelas insentif dapat mendorong keunggulan produk Indonesia di pasar Jepang.

Produk Indonesia dengan kualitas terbaik dapat dengan mudah memasuki pasar Jepang dan bersaing dengan produk dari negara mitra Jepang lainnya. Melalui beroperasinya IJEPA, Indonesia akan berupaya meningkatkan produktivitasnya, sehingga dapat meningkatkan PDB negara. Indonesia dan Jepang dapat menjajaki lebih lanjut kemungkinan mewujudkan kepentingan mereka dengan memasukkannya ke dalam IJEPA.²Indonesia dapat mempercepat arus barang dan jasa ke Jepang. Peningkatan impor dan ekspor dapat meningkatkan mata uang negara, sehingga meningkatkan PDB negara tersebut. Peningkatan perekonomian banyak didukung oleh industri. Keberadaan IJEPA ini menjadi batu loncatan bagi UKM Indonesia (usaha kecil menengah) untuk meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, Indonesia akan diuntungkan dengan peningkatan investasi Jepang. Hal ini juga akan mendorong perusahaan dalam negeri untuk lebih dikenal oleh investor asing.

Jepang dan mitra lainnya dipengaruhi oleh investasi Jepang. Adanya alih teknologi juga menjadi keunggulan Indonesia. Melalui alih teknologi ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas negara Indonesia. Peningkatan kapasitas meliputi standarisasi dan pengujian produk, standar higiene makanan dan minuman, pelatihan keterampilan produksi dan teknis, untuk meningkatkan kualitas produk Indonesia yang beredar di pasar domestik dan internasional.

Di bidang otomotif, Indonesia tertarik untuk membuat teknologi mandiri melalui proposal Jepang di bawah program MIDEK (Manufacturing Industry Development Center). Impian Indonesia melalui program MIDEK adalah upaya Indonesia untuk mandiri secara teknologi guna menghidupkan kembali proyek otomotif nasional yang telah lama diidamkan. Dalam kerjasama bilateral IJEPA, Indonesia telah mengadopsi strategi

² Ardiyanti, S. T. (2015). Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 9(2), 129–151.
<https://doi.org/10.30908/bilp.v9i2.5>

kepentingan nasional: industri merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang masing-masing negara;

2) Program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan akses pasar Jepang ke arah yang lebih luas untuk produk Indonesia yang berkualitas tinggi, meningkatkan ekspor ke luar negeri, dan meningkatkan daya saing industri manufaktur serta harapan Indonesia menjadi produsen untuk meningkatkan daya beli masyarakat. kekuatan rakyat Indonesia dan menghasilkan barang-barang manufaktur bernilai tambah yang dapat diekspor dengan harga yang kompetitif.

3) Menjadi pusat pengembangan produksi – produksi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pengembangan kapasitas industri untuk meningkatkan daya saing. Dalam pembahasan joint review IJEPA yang seharusnya dilakukan dalam waktu lima tahun, ternyata ditunda karena Jepang meminta perubahan peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menurut Jepang Jepang tidak sesuai dengan ketentuan Indonesia. komitmen di bawah IJEPA, namun tuduhan ini hanya diajukan secara sepihak oleh Jepang dan menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia telah meminta Jepang untuk memberikan informasi terkait pembangunan PMK tersebut sebelum dirilis. Indonesia berkepentingan untuk memberlakukan kategori R-1 dan R-

(renegosiasi) pada Jepang. Tipe R-1 merupakan kode tarif impor yang diharapkan dapat dirundingkan kembali bersama sebagai bagian dari joint review. Kategori R-

merupakan pajak impor yang perlu dinegosiasi ulang pada tahun keempat setelah negosiasi. Kategori R-1 dan R- merupakan kewajiban Jepang berdasarkan IJEPA yang belum efektif dipenuhi. Selain masalah yang menjadi perhatian, Indonesia juga tidak memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai, sehingga penambangan terus berlanjut. Diplomasi ekonomi terus diupayakan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menjalin kemitraan ini.

Jepang dan mitra lainnya dipengaruhi oleh investasi Jepang. Adanya alih teknologi juga menjadi keunggulan Indonesia. Melalui alih teknologi ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas negara Indonesia. Peningkatan kapasitas meliputi standarisasi dan pengujian produk, standar higiene makanan dan minuman, pelatihan keterampilan produksi dan teknis, untuk meningkatkan kualitas produk Indonesia yang beredar di pasar domestik dan internasional.

Dalam bidang otomotif, Indonesia memiliki kepentingan untuk membuat kemandirian teknologi oleh tawaran Jepang dalam program MIDEK (Manufacturing Industry Development Center). Impian Indonesia melalui skema MIDEK merupakan sebuah usaha Indonesia untuk mandiri dalam teknologi agar dapat mengembalikan proyek mobil nasional yang telah lama diinginkan. Dalam kerjasama bilateral IJEPA, Indonesia mengadopsi strategi kepentingan nasional (Atmawinata, Irianto, Diawati dan Adlir, 2008: 2-3): 1) Dalam sektor penggerak Indonesia-Jepang sepakat bahwa industri otomotif, listrik, elektronik dan Alat berat merupakan kekuatan pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi di negaranya masing-masing;

2) Program Kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pasar Jepang kearah yang lebih luas hingga ke produk-produk berkualitas tinggi milik Indonesia,³ menaikkan ekspor ke berbagai negara asing, meningkatkan daya saing industri manufaktur dan harapan Indonesia untuk menjadi Produsen untuk meningkatkan basis daya beli masyarakat Indonesia dan menghasilkan produk manufaktur bernilai tambah sehingga dapat diekspor dengan harga yang bersaing. dan

3) Menjadi pusat pengembangan manufaktur - berharap bahwa manufaktur akan berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam pengembangan kapasitas industri untuk meningkatkan daya saing. Dalam pembahasan General Review IJEPA yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun namun ternyata harus mundur karena Jepang mensyaratkan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dianggap Jepang tidak sesuai komitmen Indonesia dalam IJEPA, namun klaim ini hanyalah sepihak dinyatakan oleh Jepang dan sangat merugikan bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia telah meminta Jepang untuk memberikan informasi terkait pembangunan PMK tersebut sebelum dirilis. Indonesia berkepentingan untuk memberlakukan kategori R-1 dan R- (renegosiasi) pada Jepang. Tipe R-1 merupakan kode tarif impor yang diharapkan dapat dirundingkan kembali bersama sebagai bagian dari joint review. Kategori R- merupakan pajak impor yang perlu dinegosiasi ulang pada tahun keempat setelah negosiasi. Kategori R-1 dan R- merupakan kewajiban Jepang berdasarkan IJEPA yang belum efektif dipenuhi. Selain masalah yang menjadi perhatian, Indonesia juga tidak memiliki tujuan yang jelas untuk

³ Ministry of Trade RI, D. G. I. T. (2007). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. International Cooperation, 1-5. http://ditjenkpi.kemendag.go.id/weBSITE_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=5 Morgenthau, H. J., Thompson, K. W

dicapai, sehingga penambangan terus berlanjut. Diplomasi ekonomi terus diupayakan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menjalin kemitraan ini.

B. Peran Penting Hubungan Diplomasi Ekonomi

Peran penting diplomasi ekonomi adalah berperan sebagai instrumen dalam hubungan internasional mengenai kebijakan luar negeri. Jika pemerintah dapat menyeimbangkan kepentingan dan strategi politik luar negeri untuk melihat potensi negara lain, maka peran pemerintah akan baik. Diplomasi ekonomi Indonesia dengan Jepang terutama didorong oleh beberapa faktor, seperti latar belakang sejarah Indonesia yang menganggap Jepang sebagai sahabat tradisional Indonesia.⁴

Hubungan perdagangan ini saling menguntungkan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam sedangkan Jepang menguasai teknologi dan pasar, sehingga Indonesia dan Jepang saling membutuhkan. Seperti halnya ekonomi Jepang, tingkat pertumbuhannya tidak diragukan lagi.⁵ Perekonomian Indonesia juga bergantung pada situasi ekonomi Jepang karena negara tersebut menekankan diplomasi ekonomi dalam bentuk impor, ekspor dan investasi. Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada 2019 sebesar 31,5 miliar USD. Jepang merupakan salah satu tujuan ekspor favorit Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan diplomatik ekonomi dengan Jepang bukanlah suatu kepura-puraan. Meskipun IJEPA merupakan kerjasama ekonomi, namun diharapkan kerjasama ini dapat memberikan manfaat baik bagi Indonesia maupun Jepang. Kerja sama ini harus terus dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kedua negara.⁶

⁴ Hadi, S. (2014). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective. *East Asian Policy*, 06(03), 114–128. <https://doi.org/10.1142/s1793930514000312>

⁵ Harahap, I. K., & Esther, A. M. (2015). Dampak Penerapan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement Terhadap Ekspor Indonesia Ke Jepang. *Media Ekonomi*, 23(1), 27. <https://doi.org/10.25105/me.v23i1.3301>

⁶ Kerja sama Bilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/125/view/kerja-sama-bilateral>

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor dan investasi di kedua negara. Kerangka kerja perjanjian ini meliputi liberalisasi perdagangan dan investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi, anti persaingan, pendalaman kerjasama dan penetapan prosedur pelaksanaan perjanjian. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional Indonesia dalam perjanjian ini antara lain optimalisasi kerjasama antara Indonesia dan Jepang, memastikan akses yang lebih luas ke pasar Jepang melalui tarif yang lebih rendah, dan meningkatkan arus barang dan jasa, menerima alih teknologi, sebagai leading field, program perlindungan sosial, serta menjadi pusat pengembangan produksi.

Penilaian bersama akan dilakukan lima tahun setelah implementasi perjanjian. Namun, Jepang menunda pelaksanaan kegiatan ini hingga amandemen peraturan Menteri Keuangan yang dinilai tidak sesuai dengan IJEPA. Sedangkan Indonesia sebelumnya telah meminta Jepang untuk membuat proposal terkait regulasi ini sebelum diterbitkan. Indonesia masih mengejar kepentingan untuk menyelesaikan negosiasi ulang tarif pajak impor dan bea masuk yang belum efektif dilaksanakan. Selain mempertimbangkan kepentingan nasional, Indonesia tidak terlalu menetapkan tujuan yang jelas untuk dicapai dalam kerjasama ekonomi ini. Diplomasi ekonomi yang diinginkan Indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral didasarkan pada beberapa faktor seperti konteks sejarah, hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, serta kemajuan ekonomi Jepang. Indonesia juga tergantung situasi Perekonomian Jepang karena aktivitas impor, ekspor dan investasi yang kebetulan berdampak pada Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi saksi nilai pasar berlanjut sedang dalam tren meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, S. T. (2015). Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 9(2), 129–151. <https://doi.org/10.30908/bilp.v9i2.5>
- Hadi, S. (2014). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective. *East Asian Policy*, 06(03), 114–128. <https://doi.org/10.1142/s1793930514000312>
- Harahap, I. K., & Esther, A. M. (2015). Dampak Penerapan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement Terhadap Ekspor Indonesia Ke Jepang. *Media Ekonomi*, 23(1), 27. <https://doi.org/10.25105/me.v23i1.3301>
- Kerjasama Bilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/125/view/kerjasama-bilateral>
- Ministry of Trade RI, D. G. I. T. (2007). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. *International Cooperation*, 1–5. http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=5 Morgenthau, H. J., Thompson, K. W
- Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Beragama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme Terkooptasi. *Jurnal Budaya dan Nilai dalam Pendidikan*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.46303/jcve.2021.2>